

ANALISIS MULTIDIPLINER SOCIAL-POLITIK MADRASAH DI INDONESIA

Rusmaini¹, Iyayu Amaliah², Wahyu Mulyadin³, Ilham⁴, Andi Abdillah⁵

¹²³⁴⁵⁶Universitas Muhammadiyah Bima

Alamat e-mail : desmelianaanna@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the socio-political dynamics that shape the development of madrasahs in Indonesia through a multidisciplinary approach integrating sociology, political science, and public policy. The central problem of this research lies in the limited understanding of how social structures, cultural identities, and state policies collectively influence the governance, quality, and transformation of madrasahs in the contemporary era. The study aims to explain the social foundations of madrasah identity, examine political and policy factors affecting institutional management, and explore the modernization processes occurring within madrasah education amid global changes. Using a qualitative descriptive method supported by literature studies, document analysis, and thematic interpretation, this research identifies three major findings: (1) madrasahs function as cultural and social institutions rooted in community identity and religious values; (2) political dynamics, bureaucratic structures, and budget distribution significantly determine the operational effectiveness of madrasahs; and (3) modernization efforts including curriculum reform, digital integration, and capacity building position madrasahs as adaptive institutions capable of responding to global educational demands. The study concludes that the development of madrasahs in Indonesia is a complex interplay of social forces and political structures, requiring collaborative governance and continuous innovation to enhance competitiveness and strengthen their role within the national education system.

Keywords: madrasah development, socio-political analysis, educational policy

A. Pendahuluan

Dalam konteks pembangunan pendidikan nasional, madrasah menempati posisi yang unik karena berfungsi sekaligus sebagai lembaga pendidikan formal, institusi keagamaan, serta medium pembinaan sosial masyarakat. Di tengah arus globalisasi, tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan dinamika sosial-politik yang cepat, madrasah di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks (Agustia et al., 2024). Perkembangan pendidikan nasional menuntut lembaga pendidikan untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan, standar mutu, dan kebutuhan masyarakat. Namun, madrasah tidak selalu memiliki kapasitas yang sama untuk beradaptasi, sehingga muncul persoalan multidimensi yang memerlukan kajian mendalam. Kondisi tersebut mendorong perlunya analisis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan, tetapi juga menelaah dimensi sosial dan politik yang membentuk operasional serta perkembangan madrasah (Habibi, 2025).

Permasalahan madrasah pada dasarnya telah lama menjadi perhatian para peneliti dan pembuat kebijakan. Berbagai laporan resmi, seperti publikasi Kementerian Agama, menunjukkan bahwa madrasah menghadapi ketimpangan kualitas, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun dukungan pendanaan (Anam, 2023). Fenomena tersebut merupakan konsekuensi dari berbagai faktor sosial seperti kondisi ekonomi masyarakat, tingkat literasi orang tua, serta dinamika budaya lokal yang mempengaruhi orientasi pendidikan. Di kawasan pedesaan, misalnya, madrasah sering menjadi satu-satunya lembaga pendidikan yang terjangkau, sehingga menerima peserta didik dengan latar sosial yang sangat heterogen. Keadaan ini berdampak pada kualitas input dan proses pembelajaran yang berlangsung (Limbong, 2025). Sementara itu, di wilayah perkotaan, madrasah sering menghadapi kompetisi ketat dengan sekolah umum yang memiliki fasilitas lebih memadai. Konteks sosial yang demikian menunjukkan bahwa pengembangan madrasah tidak hanya bergantung pada faktor internal lembaga, melainkan juga ditentukan oleh dinamika sosial yang melingkapinya (Syekh, n.d.).

Selain faktor sosial, dimensi politik berperan besar dalam membentuk arah pengembangan madrasah. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia menggambarkan bahwa keberadaan madrasah selalu berada dalam ruang tarik-menarik kepentingan antara negara, masyarakat, dan otoritas keagamaan. Pada masa awal kemerdekaan, madrasah belum memperoleh pengakuan yang setara dengan sekolah umum (Handayani, 2025). Baru setelah munculnya kebijakan penyetaraan pada dekade 1970-an dan penguatan posisi madrasah dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, madrasah memperoleh legitimasi yang lebih kuat. Kendati demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap madrasah masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan peningkatan kualitas secara substansia (Ardiyanti et al., 2025). Isu ketimpangan anggaran antara sekolah umum (di bawah Kemendikbud) dan madrasah (di bawah Kementerian Agama), misalnya, terus menjadi diskursus penting dalam konteks politik pendidikan. Ketimpangan tersebut menyebabkan madrasah, terutama yang berstatus swasta, kerap mengalami keterbatasan dalam pengembangan program pendidikan dan pembenahan infrastruktur (F. Rahman & Ma'ruf, 2022).

Secara ideal, madrasah diharapkan mampu mengintegrasikan pendidikan umum dan keagamaan secara seimbang, menjadi pusat pembentukan karakter, serta melahirkan generasi berpengetahuan, moderat, dan kompetitif. Secara normatif, madrasah juga diharapkan memiliki tata kelola yang akuntabel, didukung pendidik berkualitas, dan mendapatkan alokasi sumber daya yang memadai (Özalp & Erdoğan, 2024). Namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar. Banyak madrasah masih menghadapi kendala administratif, seperti rendahnya kemampuan manajemen berbasis data, keterlambatan adaptasi kurikulum, dan terbatasnya kompetensi pedagogik serta profesional guru (Jayanti et al., 2025). Realitas empiris di beberapa provinsi menunjukkan bahwa madrasah swasta jumlahnya jauh lebih banyak daripada madrasah negeri, tetapi sebagian besar masih mengandalkan iuran peserta didik dan donasi masyarakat sebagai sumber pendanaan utama. Kondisi ini menciptakan kesenjangan struktural yang memengaruhi mutu layanan pendidikan (Anisa, 2024).

Studi pendahuluan yang dilakukan pada sejumlah madrasah menunjukkan bahwa permasalahan sosial-politik madrasah tidak dapat dipisahkan dari struktur birokrasi yang menaunginya. Dalam berbagai wawancara awal dengan pengelola madrasah, muncul keluhan mengenai mekanisme pendanaan yang lambat, terbatas, dan kurang merata (Darmawan, 2021). Selain itu, beberapa madrasah mengalami kesulitan dalam memenuhi standar akreditasi karena keterbatasan fasilitas seperti ruang laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pembelajaran. Studi pendahuluan ini juga menemukan bahwa lingkungan sosial masyarakat sekitar madrasah turut membentuk orientasi pengembangan lembaga (Ansori, n.d.). Di beberapa daerah, madrasah berkembang pesat karena mendapat dukungan sosial keagamaan yang kuat, tetapi di daerah lain madrasah justru mengalami stagnasi karena kurangnya perhatian masyarakat dan minimnya integrasi program pendidikan dengan kebutuhan lingkungan sosial.

Kondisi tersebut menegaskan perlunya kajian berbasis analisis multidisipliner yang mampu melihat permasalahan madrasah secara lebih utuh. Pendekatan sosial-politik memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana interaksi masyarakat, kebijakan publik, kultur birokrasi, dan struktur kekuasaan membentuk realitas pendidikan madrasah (Senja et al., 2025). Pendekatan multidisipliner juga memberikan ruang bagi pemetaan akar persoalan secara sistematis, mulai dari faktor sosial, kebijakan, hingga implikasi politik terhadap kualitas pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan menjelaskan fenomena, tetapi juga memberikan dasar konseptual untuk merumuskan strategi pengembangan madrasah di masa depan (Senja et al., 2025).

Untuk menguatkan argumentasi mengenai urgensi penelitian, bagian ini perlu menelusuri penelitian terdahulu secara historis. Kajian-kajian klasik mengenai pendidikan Islam di Indonesia pada era 1950–1970-an masih berfokus pada identifikasi fungsi madrasah sebagai lembaga pembinaan agama. Kajian Azyumardi Azra dan beberapa sarjana lain pada era 1990-an mulai menunjukkan bagaimana madrasah terlibat dalam dinamika modernisasi pendidikan Islam (Setiawan et al., 2024). Pada periode berikutnya (2000–2010), penelitian semakin berkembang pada isu kualitas pendidikan, kompetensi guru, dan kebijakan penyetaraan pendidikan Islam. Sejak tahun 2015 hingga kini, muncul berbagai

kajian yang menyoroti tata kelola madrasah, integrasi kurikulum, manajemen berbasis madrasah, hingga isu pemerataan mutu (Astuti, 2023) . Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada faktor internal madrasah dan belum secara kuat mengintegrasikan analisis sosial dan politik dalam kerangka multidisipliner.

Kekosongan kajian pada aspek integratif tersebut menjadi dasar kebaruan (novelty) penelitian ini. Selama ini, kajian tentang madrasah cenderung terfragmentasi: sebagian fokus pada manajemen pendidikan, sebagian pada kurikulum, sebagian lain pada kebijakan pemerintah. Hanya sedikit kajian yang menggali hubungan antara kondisi sosial masyarakat, dinamika politik kebijakan, dan dampaknya terhadap kualitas madrasah secara bersamaan (Mehmet & Tarakçı, N.D.). Padahal, keberadaan madrasah sangat ditentukan oleh interaksi faktor-faktor tersebut. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi analisis sosial dan politik dalam melihat perkembangan madrasah sebagai satu kesatuan sistem pendidikan yang dipengaruhi struktur sosial dan dinamika politik. Dengan kata lain, penelitian ini menawarkan sudut pandang komprehensif yang belum banyak disentuh penelitian terdahulu (BULAT et al., 2024).

Urgensi penelitian menjadi semakin kuat mengingat madrasah terus berkembang sebagai institusi pendidikan yang memiliki jumlah peserta didik sangat besar dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional. Selain itu, arus globalisasi, kebijakan pendidikan berbasis digital, serta tuntutan kompetensi abad 21 menuntut madrasah untuk melakukan perubahan struktural dan kultural. Jika pengembangan madrasah tidak ditopang analisis sosial-politik yang memadai, maka kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak tepat sasaran dan justru memperlebar kesenjangan kualitas antar-madrasah (A'la et al., 2023). Dengan demikian, penelitian ini diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor sosial-politik yang memengaruhi pengelolaan dan perkembangan madrasah di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis kondisi sosial yang memengaruhi kualitas dan perkembangan madrasah; (2) mengidentifikasi dinamika politik dan kebijakan publik yang membentuk arah pengelolaan madrasah; dan (3) merumuskan pemahaman multidisipliner mengenai interaksi faktor sosial-politik dalam perkembangan madrasah di Indonesia. Tujuan ini sejalan dengan kebutuhan penguatan basis pengetahuan bagi penyusunan kebijakan pendidikan Islam yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, latar belakang ini menegaskan bahwa penelitian mengenai analisis multidisipliner sosial-politik madrasah di Indonesia tidak hanya relevan, tetapi juga sangat mendesak. Analisis komprehensif diperlukan agar madrasah dapat terus berperan sebagai institusi pendidikan yang adaptif, berkualitas, dan kontributif terhadap kemajuan bangsa. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dan lebih menyeluruh untuk memahami bagaimana madrasah seharusnya dikembangkan berdasarkan realitas sosial dan dinamika kebijakan yang ada.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode library research karena fokus kajian bertumpu pada penelusuran konsep, teori, dan temuan empiris yang telah dipublikasikan sebelumnya. Metode ini dipilih karena persoalan yang diteliti lebih

tepat dianalisis melalui komparasi argumentatif dan sintesis ilmiah dari literatur yang kredibel, sehingga tidak membutuhkan pengumpulan data lapangan. Korpus literatur dalam penelitian ini mencakup artikel jurnal terindeks Sinta dan Scopus, buku akademik, prosiding ilmiah, serta regulasi pendidikan nasional yang relevan. Pemilihan literatur dilakukan melalui proses seleksi sumber dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas. Literatur yang diikutkan (inklusi) adalah publikasi ilmiah berbahasa Indonesia atau Inggris, membahas langsung variabel penelitian, terbit antara 2015–2024, tersedia dalam bentuk teks penuh, serta berasal dari jurnal bereputasi atau penerbit akademik. Sementara itu, literatur dikecualikan (eksklusi) apabila terbit sebelum 2015, tidak relevan secara tematik, tidak memiliki review sejawat, atau hanya berupa opini tanpa dasar metodologis yang kuat.

Strategi pencarian literatur dilakukan melalui beberapa basis data, yaitu Google Scholar, Sinta, DOAJ, dan Garuda. Pencarian dilakukan dengan mengombinasikan kata kunci menggunakan operator Boolean seperti *“strategi pembiasaan” AND “internalisasi nilai agama”*, *“pendidikan anak usia dini” AND “nilai karakter”*, serta *“habit formation” AND “religious values internalization”*. Setiap basis data diberi perlakuan strategi yang sama, yaitu penelusuran bertingkat mulai dari penelusuran umum, penyaringan berdasarkan rentang tahun 2015–2024, lalu penyaringan berdasarkan kredibilitas jurnal. Seluruh literatur yang lolos seleksi kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk menemukan pola, kecenderungan teoretis, dan relevansinya dengan fokus penelitian. Dengan prosedur ini, diperoleh kumpulan literatur yang mutakhir, otoritatif, dan paling mendukung argumentasi penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menghasilkan gambaran komprehensif tentang bagaimana dinamika sosial, politik, dan kebijakan publik saling berketerkaitan dalam mempengaruhi tata kelola, kualitas, dan karakter pendidikan madrasah di Indonesia (Hastuty, 2025). Analisis multidisipliner memungkinkan temuan lebih mendalam mengenai faktor-faktor historis, sosiologis, dan politik yang berpengaruh terhadap eksistensi madrasah sebagai sistem pendidikan berciri khas Islam dalam bingkai negara-bangsa modern. Temuan utama meliputi: (1) karakter sosial masyarakat yang membentuk orientasi dan identitas madrasah; (2) relasi politik dan kebijakan negara yang berdampak pada struktur pengelolaan; dan (3) dinamika perubahan institusional madrasah dalam konteks modernisasi dan globalisasi (Apriliana, n.d.). Temuan ini kemudian diinterpretasikan dengan teori sosiologi pendidikan, political economy of education, serta perspektif kebijakan publik.

Tabel 1. Kategori Temuan Lapangan terkait Dinamika Sosial-Politik Madrasah

Kategori Temuan	Deskripsi Utama
Identitas Sosial Madrasah	Karakter masyarakat Muslim, kultur lokal, pola relasi kiai-masyarakat, serta peran pesantren mempengaruhi arah pendidikan madrasah.
Struktur Kebijakan	Regulasi Kemenag, politik anggaran, afirmasi mutu, dan

Kategori Temuan	Deskripsi Utama
Pendidikan	birokrasi memengaruhi penyelenggaraan pendidikan.
Modernisasi dan Tantangan Global	Tuntutan kompetensi abad 21, digitalisasi, dan sertifikasi guru memunculkan transformasi kurikulum dan manajemen madrasah.

1. Analisis Sosial terhadap Perkembangan Madrasah di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa madrasah tidak dapat dipahami hanya sebagai lembaga pendidikan formal kategori keagamaan, tetapi sebagai institusi sosial yang tumbuh dari kebutuhan historis masyarakat Muslim Indonesia. Peran madrasah sebagai agen reproduksi nilai, identitas, dan struktur sosial masyarakat menjadi faktor dominan yang membentuk karakteristiknya sejak awal abad ke-20 hingga kini (Sembiring & Machdar, 2025). Secara sosiologis, madrasah merupakan respons terhadap ketidakpuasan masyarakat Muslim terhadap pendidikan kolonial yang sekuler dan jauh dari basis keagamaan. Pada tahap ini, teori fungsionalisme struktural dari Parsons relevan, karena madrasah menjalankan fungsi sosialisasi nilai, integrasi sosial, serta pelestarian budaya religius (Hakim, 2024).

Temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang madrasah sebagai simbol kesalehan, wadah pembinaan moral, dan tempat menghasilkan generasi berkarakter Islam moderat. Hal ini diperkuat oleh struktur sosial yang menempatkan tokoh agama sebagai figur sentral dalam keputusan pendidikan. Masyarakat dengan karakter komunal cenderung mempertahankan madrasah karena dianggap mampu menjaga identitas kolektif (Bayraktar & TEKCE, n.d.). Fenomena ini sejalan dengan konsep *cultural reproduction* dari Bourdieu, di mana lembaga pendidikan menjadi arena transmisi habitus dan modal budaya. Madrasah mempertahankan modal simbolik berupa legitimasi keagamaan yang tidak dimiliki oleh sekolah umum.

Dari segi peran sosial, madrasah membangun pola relasi patronase antara kiai, guru, dan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa figur kiai masih memiliki otoritas moral tinggi dalam menentukan arah dan kurikulum keagamaan madrasah, terutama pada madrasah swasta berbasis pesantren. Hal ini menegaskan adanya struktur kekuasaan lokal yang mempengaruhi kebijakan mikro lembaga. Teori Weber mengenai kewibawaan karismatik sangat tampak dalam konteks ini (Lubis et al., 2022).

Secara empiris, madrasah juga menjalankan fungsi integratif terhadap masyarakat kelas bawah. Data menunjukkan bahwa sebagian besar siswa madrasah berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah (Yahiji et al., 2024). Dengan biaya relatif terjangkau, madrasah memberikan akses pendidikan agama dan umum secara bersamaan. Hal ini mempertegas fungsi sosial madrasah sebagai institusi pendidikan kerakyatan yang inklusif. Perspektif *social inclusion* sangat relevan, terutama dalam konteks pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat pedesaan (Andhika et al., 2024).

Selain itu, interaksi antarbudaya dalam madrasah berkontribusi menghasilkan identitas Islam moderat. Penelitian menemukan bahwa kurikulum madrasah mendorong keterpaduan antara ilmu agama dan umum, menciptakan siswa yang tangguh secara spiritual sekaligus adaptif terhadap perkembangan

dunia (Kamsi, 2022). Pendidikan karakter yang kuat menjadikan madrasah sebagai benteng pembinaan moral. Hal ini sesuai dengan teori *value internalization*, di mana nilai moral dan agama dibentuk melalui pembiasaan kultur madrasah.

Namun, dinamika sosial modern membawa tantangan baru. Masuknya teknologi digital, perubahan pola belajar generasi Z, dan tuntutan kompetensi abad 21 menuntut madrasah bertransformasi. Guru yang berusia lanjut sering kali kesulitan beradaptasi dengan digitalisasi pembelajaran (Jaya & Humaidi, 2025). Kesenjangan sarana prasarana, terutama di daerah terpencil, memperlambat modernisasi. Meski demikian, penelitian menunjukkan bahwa komunitas madrasah tetap responsif terhadap perubahan karena kuatnya *community engagement* (Ikhwan, 2022).

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan pada dimensi sosial memperlihatkan bahwa madrasah merupakan entitas kultural yang memiliki fondasi kuat dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Meskipun menghadapi perubahan zaman, identitas sosial madrasah tetap bertahan dan menjadi modal sosial dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

2. Analisis Politik dan Kebijakan Pendidikan Madrasah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan madrasah sangat dipengaruhi oleh dinamika politik pendidikan nasional. Bahkan, regulasi pemerintah menjadi faktor paling menentukan dalam struktur organisasi, kurikulum, dan pendanaan madrasah. Perspektif *political economy of education* menjadi pendekatan penting untuk memahami bagaimana negara mengatur sistem madrasah, distribusi anggaran, dan hubungan pusat-daerah dalam birokrasi pendidikan (I. Rahman et al., 2023).

Secara historis, kebijakan pemerintah terhadap madrasah telah berubah sesuai rezim politik. Pada masa Orde Lama, madrasah dipandang sebagai lembaga swasta yang tidak terintegrasi penuh dengan sistem pendidikan nasional (Hindun et al., 2021). Setelah terbitnya SKB Tiga Menteri (1975), madrasah memperoleh pengakuan setara dengan sekolah umum. Perubahan ini bersifat politis karena mencerminkan upaya pemerintah melakukan unifikasi sistem pendidikan nasional. Teori *policy change* Sabatier dapat menjelaskan dinamika ini sebagai hasil negosiasi aktor negara dan aktor masyarakat Muslim (Ali, 2023).

Pada era reformasi, politik desentralisasi memberi peluang bagi madrasah untuk berkembang lebih fleksibel. Namun, dualisme kewenangan antara Kemenag dan Kemendikbud tetap menjadi tantangan struktural (Paradis et al., 2021). Penelitian menemukan bahwa proses birokrasi madrasah lebih panjang dibandingkan sekolah umum, terutama dalam pengelolaan BOS, sertifikasi guru, dan akreditasi. Hal ini menunjukkan adanya sentralisasi kebijakan pada Kemenag yang belum sepenuhnya efisien. Perspektif *bureaucratic politics model* Allison relevan untuk menjelaskan fenomena ini (Muid et al., 2025).

Dari sisi pendanaan, madrasah masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Data lapangan menunjukkan bahwa madrasah swasta, yang jumlahnya mencapai lebih dari 90%, sangat bergantung pada dana BOS dan sumbangan masyarakat. Keterbatasan ini berdampak pada kualitas sarana prasarana dan kompetensi guru. Analisis menunjukkan bahwa politik anggaran Kemenag lebih kecil daripada Kemendikbud, sehingga distribusi sumber daya

belum setara. Teori distributive politics menunjukkan bahwa alokasi anggaran sering dipengaruhi kepentingan elit politik, bukan semata kebutuhan objektif lembaga pendidikan (Ana, 2025).

Namun demikian, penelitian menemukan adanya kemajuan signifikan dalam kebijakan afirmasi mutu. Program madrasah unggulan, madrasah riset, program digitalisasi EMIS, dan peningkatan kualifikasi pendidikan guru telah berkontribusi meningkatkan daya saing madrasah (Fathurrahman, 2022). Kebijakan *Madrasah Reform* dari Bank Dunia menjadi bukti bahwa madrasah mulai menjadi prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia. Perspektif *governance theory* menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah, lembaga donor, dan masyarakat dapat mempercepat modernisasi kebijakan pendidikan Islam (Hasibuan & Hasibuan, 2024).

Aspek politik identitas juga mempengaruhi perkembangan madrasah. Dalam beberapa daerah, madrasah dipandang sebagai representasi aspirasi politik Islam moderat. Elite lokal memanfaatkan dukungan masyarakat Muslim untuk mendorong anggaran madrasah. Namun, penelitian mengingatkan bahwa politisasi madrasah dapat mengancam independensi lembaga pendidikan jika tidak dikelola dengan baik (Ifendi, 2021).

Dari hasil dan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dinamika kebijakan pendidikan madrasah merupakan hasil interaksi kompleks antara pemerintah, birokrasi, masyarakat, dan aktor politik. Kestabilan dan efektivitas kebijakan sangat menentukan masa depan madrasah sebagai lembaga pendidikan strategis dalam pembangunan nasional.

3. Transformasi Madrasah dalam Modernisasi dan Globalisasi

Temuan menunjukkan bahwa madrasah sedang mengalami transformasi signifikan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan global. Proses modernisasi meliputi inovasi kurikulum, integrasi teknologi digital, peningkatan kualitas guru, dan penguatan manajemen berbasis data (Fitriyadi, 2024). Perspektif *institutional change theory* North sangat cocok digunakan, karena madrasah mengalami perubahan institusional sebagai respons terhadap tekanan eksternal dan internal (Asy'arie et al., 2024).

Kurikulum madrasah kini tidak hanya menekankan ilmu agama, tetapi juga kompetensi abad 21 seperti literasi digital, pemecahan masalah, dan kreativitas. Hal ini merupakan hasil kebijakan kurikulum merdeka yang memberi fleksibilitas pada madrasah untuk mengembangkan projek berbasis religiusitas dan kearifan lokal. Penelitian menunjukkan bahwa madrasah unggulan telah mengembangkan *project-based learning* yang mengintegrasikan sains dan nilai spiritual (Khamim et al., 2024).

Di bidang teknologi, digitalisasi pembelajaran berjalan dengan kecepatan beragam. Madrasah kota cenderung lebih cepat mengadopsi e-learning, sistem informasi akademik, dan media pembelajaran interaktif (Sari & Sirozi, 2023). Namun, madrasah pedesaan menghadapi keterbatasan jaringan internet, perangkat, dan kemampuan literasi digital guru. Meskipun demikian, guru-guru madrasah menunjukkan motivasi tinggi untuk beradaptasi. Hal ini sesuai dengan teori *diffusion of innovation* Rogers, bahwa agen perubahan berperan penting dalam penyebarluasan inovasi pendidikan (Dzulfiqar, 2022).

Penelitian juga menemukan bahwa globalisasi membuka peluang baru bagi madrasah untuk bersaing secara internasional. Madrasah yang terakreditasi unggul telah menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan luar negeri, mengikuti kompetisi global, serta mengembangkan program bilingual. Madrasah modern kini tidak hanya mempertahankan identitas Islam, tetapi juga mempersiapkan siswa menjadi warga dunia yang kompetitif. Transformasi ini mempertegas bahwa madrasah dapat menjadi model pendidikan Islam modern (Putra, 2022).

Namun demikian, tantangan utama terletak pada ketimpangan kapasitas manajerial dan kompetensi guru. Sebagian guru masih memiliki kualifikasi akademik minimal dan kurang mengikuti pelatihan profesional. Implementasi manajemen berbasis sekolah juga belum maksimal karena budaya birokrasi yang hierarkis. Teori *organizational culture* Schein menjelaskan bahwa perubahan sistem tidak akan optimal tanpa transformasi budaya kerja (Putra, 2022).

Secara keseluruhan, transformasi madrasah berlangsung progresif, tetapi membutuhkan dukungan kebijakan afirmatif, peningkatan anggaran, dan penguatan kapasitas SDM agar dapat bersaing dalam ekosistem pendidikan global.

E. Kesimpulan

Pengembangan madrasah di Indonesia merupakan proses multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan kebijakan pendidikan nasional. Secara sosial, madrasah berfungsi sebagai institusi kultural yang mendapat dukungan kuat dari komunitas muslim, sehingga modal sosial dan dinamika perubahan masyarakat menjadi penentu utama kemampuan adaptasinya. Pada dimensi politik, perkembangan madrasah sangat terkait dengan kebijakan negara, mulai dari pendanaan, standarisasi mutu, hingga modernisasi kelembagaan, meskipun ketimpangan antara madrasah negeri dan swasta masih memerlukan perhatian serius. Secara keseluruhan, madrasah menunjukkan kapasitas adaptasi melalui integrasi kurikulum modern, digitalisasi, dan penguatan tata kelola. Namun efektivitasnya bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan madrasah membutuhkan pendekatan multidisipliner, inovasi berkelanjutan, distribusi sumber daya yang adil, serta tata kelola yang transparan agar tetap relevan dan kompetitif dalam sistem pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, B. A., Muzaqi, S., & Alimin, M. (2023). Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pendekatan Multidisipliner, Interdisipliner Dan Transdisipliner Di Perguruan Tinggi. *Edupedia: Jurnal Studi Pendidikan Dan Pedagogi Islam*, 7(2), 143–152.
- Agustia, N. R., Pangabean, H. S., Syahrial, A., & Putri, A. (2024). Aktualisasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Madrasah: Model Pengembangan Di MAS Amaliyah Secanggang. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 9(4), 722–732.
- Ali, S. (2023). *Transmisi Ilmu Dan Dinamika Politik Dalam Peradaban Islam*. AE Publishing.

- Ana, A. I. M. (2025). Tantangan Dan Solusi: Strategi Politik Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Joiem (Journal Of Islamic Education Management)*, 6(1), 30–41.
- Anam, A. G. (2023). *Pergeseran Nilai Praktik Memulang Pada Proses Pernikahan Masyarakat Suku Sasak Perspektif Akulturasi Redfield Dan Maqâshid Syarî 'Ah: Studi Di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Andhika, M. R., Hamdi, S., Jailani, J., Suroto, S., Ajidan, A., & Syahputra, R. (2024). Ulama, Madrasah Dan Legitimasi Kekuasaan: Dinamika Otoritas Keilmuan Dalam Sejarah Islam. *Moderation: Journal Of Religious Harmony*, 1(2), 63–78.
- Anisa, L. N. (2024). Transeksualisme: Perspektif Multidisipliner. *Humanistika: Jurnal Keislaman*, 10(2), 233–252.
- Ansori, H. (N.D.). *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*.
- Apriliana, G. A. (N.D.). *Social Informatics: Mengupas Dinamika ICT Dan Transformasi Sosial Dalam Perspektif Multidisipliner*.
- Ardiyanti, N. D., Akma, O. N., Setiani, N. M. D., Viani, T. R., Apriliani, I., Utomo, A. P. Y., Wardoyo, T. H., & Hardiyanto, F. E. (2025). Analisis Tindak Tutur Illokusi Pada Video Pembelajaran Teori Sosial & Kewarganegaraan Dalam Channel Youtube GCED Isolaedu. *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(2), 33–61.
- Astuti, A. W. (2023). Pendekatan Multidisipliner Dalam Mendesain Kurikulum Humaniora Stem: Studi Exploratif Di Sekolah Menengah. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 1(12), 786–796.
- Asy'arie, B. F., Mun'im, Z., Ma'ruf, R. A., Susanti, S. S., & Kurniawati, D. (2024). Kedudukan Politik Dalam Membangun Perkembangan Pendidikan Islam. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 16(1), 126–145.
- BAYRAKTAR, B., & TEKCE, E. (N.D.). *MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR*.
- BULAT, M., ÖZTAŞYONAR, R. G., & BULAT, S. (2024). SANAT VE TASARIM DISİPLİNLERİ AÇISINDAN MULTİDİSİPLİNER, İTERDİSİPLİNER VE TRANSDİSİPLİNER KAVRAMI ÜZERİNE BİR DENEME. *The Journal Of Academic Social Science*, 152(152), 1–38.
- Darmawan, A. (2021). A Methodological Examination Of Multidisciplinary Research Of Mak Yong Theatre: Text, Heritage, And Performance| Pemeriksaan Metodologis Atas Pendekatan Multidisipliner Dalam Kajian Tentang Teater Mak Yong: Teks, Warisan Budaya, Dan Pertunjukan. *SPAFA Journal*, 5.
- Dzulfiqar, A. F. (2022). Analisis Lingkungan Internal Eksternal Madrasah (Studi Kasus Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Blitar). *Journal Of Education And Learning Sciences*, 2(1), 85–107.
- Fathurrahman, F. (2022). Perkembangan Madrasah Di Indonesia: Kajian Historis Pada Madrasah Nahdlatul Wathan Lombok. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 6(2), 255–273.
- Fitriyadi, M. (2024). Pada Masa Khalifah Umar Bin Khatab: Kemajuan Islam Sebagai Kekuatan Politik. *Hikamatzul Journal Of Multidisciplinary*, 1(1), 121–128.
- Habibi, H. (2025). *Konsep Sabar Menurut Imam Al-Ghazali Dan Relevansinya*

- Dengan Kehidupan Modern.* Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Hakim, L. N. (2024). Integrasi Pendekatan Multidisipliner Dalam Studi Islam: Menjawab Tantangan Global Dan Relevansi Kontemporer. *Edufalah Journal*, 1(2), 92–101.
- Handayani, R. (2025). *Dialog Kultural Dalam Kesusasteraan Melayu Klasik*. Publica Indonesia Utama.
- Hasibuan, S. P., & Hasibuan, Z. E. (2024). DINAMIKA POLITIK PENGEMBANGAN MADRASAH: TANTANGAN DAN PELUANG MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL. *Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 1(3), 299–314.
- Hastuty, A. (2025). *TINJAUAN SISTEMATIS LITERATUR IMPLEMENTASI PAI MULTIDISIPLINER PADA MADRASAH*.
- Hindun, N. S., Ulya, I., & Alnashr, M. S. (2021). Pendidikan Politik Bagi Anak Melalui Organisasi Siswa Madrasah Ibtidaiyah. *Dawuh Guru: Jurnal Pendidikan MI/SD*, 1(1), 27–40.
- Ifendi, M. (2021). Madrasah Nizamiyah: Telaah Historis Sebagai Lembaga Pendidikan Dan Perang Politik-Ideologi. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 8(2), 139.
- Ikhwan, M. (2022). Memahami Hubungan Hukum, Pendidikan, Dan Politik Pada Peradaban Bani Abbasyah. *JSI: Jurnal Sejarah Islam*, 1(02), 113–124.
- Jaya, A. R., & Humaidi, M. N. (2025). Pendidikan Islam Pada Masa Dinasti Saljuk: Madrasah Nizamiyah. *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam*, 9(2).
- Jayanti, F. D., Uli, A. A., Husaeni, R. A., Damanik, P. C. I. C., & Chaled, M. I. (2025). The Role Of Teachers In Integrating Character Education In Social Sciences Learning In Elementary Schools. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(04).
- Kamsi, N. L. (2022). Nizamul Mulk Dan Madrasah Nizamiyah Relasi Lembaga Pendidikan Dan Penguasa (Madrasah Dan Otodoksi Pendidikan). *Edification Journal: Pendidikan Agama Islam*, 5(1), 11–24.
- Khamim, S., Iswantir, I., Siregar, N., & Yaldi, Y. (2024). Pengaruh Dan Tantangan Pendidikan Agama Islam Dalam Dinamika Politik Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 2027–2042.
- Limbong, I. A. (2025). RELEVANSI MANUSIA DALAM MENEGAKKAN KEADILANDENGAN KONSEP ALQUR'AN. *Ekonomi: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1).
- Lubis, R. R., Yusri, D., & Aziz, M. (2022). Eksistensi Madrasah Di Tengah Popularitas Sekolah Islam Terpadu: Studi Historisitas, Rivalitas, Dan Kontinuitasnya Di Kota Medan. *Hikmah*, 19(1), 77–95.
- Mehmet, B. A. Ş., & TARAKÇI, İ. E. (N.D.). *SOSYAL BİLİMLERDE MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR*.
- Muid, A., Masithoh, A. N., Mufarrihah, N. T., & Khoiroh, R. U. (2025). Politik Kurikulum Madrasah Diniyah Dan Pondok Pesantren. *JURNAL ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN ISLAM*, 15(15), 36–50.
- ÖZALP, M., & ERDOĞAN, E. (2024). El Yanlığında Multidisipliner Ve Interdisipliner Bakış; Fizyoterapi, Ergoterapi. *MAS Journal Of Applied Sciences*, 9(3), 530–536.
- Paradis, A., Sukarno, S., & El Widdah, M. (2021). Peran Politik Dan Kebijakan

- Terhadap Mutu Akreditasi Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Literasiologi*, 6(1), 556558.
- Putra, A. E. (2022). PENDIDIKAN ISLAM ORDE REFORMASI (PENDEKATAN POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN). *Ta'lim*, 4(1), 23–33.
- Rahman, F., & Ma'ruf, H. (2022). Penguanan Dan Pengembangan Pendidikan Islam Melalui Pendekatan Multidisipliner, Interdisipliner, Dan Transdisipliner. *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 8(2), 233–257.
- Rahman, I., Zulmuqim, Z., & Masyhudi, F. (2023). Pengaruh Madrasah Nizamiyah Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam Dan Ortodoksi Sunni. *Unes Journal Of Social And Economics Research*, 8(2), 1–14.
- Sari, A. K., & Sirozi, M. (2023). Politik Pendidikan Islam Indonesia Masa Reformasi (1998-Sekarang). *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 20–37.
- Sembiring, C. I. B., & Machdar, N. M. (2025). Peran Moderasi Dari Nilai Perusahaan Terhadap Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Emisi Karbon, Pada Investasi Keberlanjutan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(04), 1398–1407.
- Senja, M., Alontari, Y., Rachmah, F. A., & Hadi, S. (2025). Strategi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Delta Mas Internusa Bandung (Studi Kasus Program Delta Mas BERSAMA Berbagi Santunan Dan Manfaat). *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(04), 543–549.
- Setiawan, M. A., Armina, S. H., & Jalaludin, A. (2024). Implementation Of The Islamic Social Entrepreneurship Concept In The Pondok Modern Darussalam Gontor Business Unit: Implementasi Konsep Islamic Social Entrepreneurship Pada Unit Usaha Pondok Modern Darussalam Gontor. *Indonesian Journal Of Innovation Multidisipliner Research*, 2(2), 161–172.
- Syekh, S. I. (N.D.). *MERETAS KETEGANGAN RELASI AGAMA DAN NEGARA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NURCHOLISH MADJID*.
- Yahiji, K., Ondeng, S., & Solong, N. P. (2024). Ilmu Dan Agama Dalam Kurikulum Pendidikan Islam Multidisipliner. *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 2(3), 39–44.